

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA



DOKUMEN RENJA

BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH DAN STATISTIK 2025

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan rahmat-Nya semata sehingga “Rencana Kerja Badan Penelitian, Pengembangan Daerah dan Statistik Kabupaten Halmahera Utara” Tahun Anggaran 2025 ini dapat disusun.

Melalui penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini diharapkan akan diperoleh secara jelas dan rinci gambaran rencana kerja yang akan dilaksanakan selama kurung waktu satu tahun anggaran dalam rangka memenuhi tugas pokok dan fungsi sebagaimana tertuang dalam perubahan kelembagaan dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang kemudian ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara dan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian Pengembangan Daerah dan Statistik.

Rencana Kerja (Renja) ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dan arah kebijakan untuk meningkatkan kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Tahun Anggaran 2025, sekaligus sebagai landasan pijakan guna penyusunan program dan kegiatan pada tahun – tahun berikutnya. Pada akhirnya semoga penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini bermanfaat bagi kita semua.

Tobelo, Maret 2024

Kepala Badan
Penelitian, Pengembangan Daerah &
Statistik
Kabupaten Halmahera Utara



E. J. LONDINGKENE, S.Sos, MTP
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19680720198803 1 004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Bab I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
Bab II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAERAH & STATISTIK KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN 2023	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Penelitian Pengembangan Daerah & Statistik Kab. Halmahera Utara Tahun 2023	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	14
2.3. Isu – Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Penelitian, Pengembangan Daerah & Statistik	16
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	18
2.5. Penelaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat / Pemangku Kepentingan	24
Bab III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	25
3.1. Telaan Terhadap Kebijakan Nasional	25
3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	27
3.3. Program dan Kegiatan	28
Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025	30
Bab V. PENUTUP	35

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Evaluasi Hasil Renja Badan penelitian Pengembangan Daerah & Statistik Tahun 2023	7
Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	15
Tabel 2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	19
Tabel 4.1. Rencana Program, Kegiatan Tahun 2025	31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Halmahera Utara sebagai unsur penunjang Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dalam penelitian, pengembangan daerah dan Statistik, mempunyai tugas utama dan bertanggung jawab dalam penelitian, pengembangan dan statistik di Kabupaten Halmahera Utara agar sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah diamanahkan Undang-undang yaitu terkoordinasi, terintegrasi, tersinkronisasi dan tersimplikasi sehingga memberikan kontribusi kepada pencapaian Visi dan Misi pembangunan Daerah. Sebagai tindak lanjut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 44 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Badan Penelitian, Pengembangan Daerah & Statistik kabupaten Halmahera Utara maka wajib bagi Badan Penelitian, Pengembangan & Statistik Kabupaten Halmahera membantu Bupati / Wakil Bupati dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi dalam Penelitian, Pengembangan dan Statistik.

Rencana Kerja (RENJA) Badan Penelitian, Pengembangan Daerah & Statistik kabupaten Halmahera Utara merupakan Penjabaran Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penelitian, Pengembangan Daerah & Statistik Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026. RENJA disusun sebagai pedoman penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Badan Penelitian, Pengembangan Daerah & Statistik Kabupaten Halmahera Utara pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025. Setiap tahunnya Perangkat Daerah wajib menjabarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah kedalam Rencana Program dan Kegiatan tahunan yang disusun dalam suatu dokumen Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun sebagai

acuan pemangku kepentingan dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun bersangkutan.

Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah menunjukkan bahwa rencana kerja, program dan kegiatan yang termuat dalam RKPD harus terukur dan dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan anggaran, serta menjadi dasar bagi penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah & Statistik (Balitbangda dan Statistik) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2025 didasarkan pada Landasan Hukum sebagaimana berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian Dan Pengembangan Di Lingkungan Depdagri Dan Pemda;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistim Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkaltur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susuna Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016, Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021- 2026;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2022;

15. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian Pengembangan Daerah dan Statistik
16. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja adalah sebagai pedoman bagi Badan Penelitian, Pengembangan Daerah & Statistik Kabupaten Halmahera Utara dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi institusi. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) ini bertujuan untuk :

1. Mewujudkan sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah.
2. Menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.
3. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan, pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik
4. Mengoptimalkan peran dan fungsi perumusan kebijakan teknis di Bidang Penelitian dan Pengembangan.
5. Untuk memberikan arah kebijakan pokok pembangunan bidang kelitbang dan Statistik sesuai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati.
6. Terwujudnya kinerja Badan Penelitian, Pengembangan Daerah & Statistik yang berkualitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

1.4. Sistematika Penulisan

Penulisan Rencana Kerja (Renja) Badan Penelitian, Pengembangan Daerah dan Statistik Kabupaten Halmahera Utara mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat tentang evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu dan capaian renstra perangkat daerah, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD serta Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

Memuat Telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, serta Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat Rencana Kerja dan besaran anggaran sesuai dengan pagu indikatif tahun 2025.

BAB V. PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAERAH & STATISTIK
KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Badan Penelitian, Pengembangan Daerah & Statistik Kabupaten Halmahera Utara

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan triwulan II ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di Tahun 2023, dimana hasil evaluasi dilakukan oleh Tim Penyusun Perubahan RKPD Kabupaten Halmahera Utara yang meliputi realisasi pencapaian target kegiatan, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi yang menunjukkan perlunya dilakukan perubahan dengan pertimbangan :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
2. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang undangan;
3. Pergeseran pagu anggaran antar perangkat daerah, penambahan kegiatan baru/alternatif, pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Rekapitulasi Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Badan Penelitian, Pengembangan Daerah & Statistik Tahun 2024 dapat dilihat pada **tabel 2.1** dibawah ini :

Tabel 2.1.
Evaluasi Hasil Renja Badan Penelitian, Pengembangan Daerah & Statistik Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra SKPD)	Realisasi Target kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2024)	
									Target renja perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	0	0			PROG. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/ KOTA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	100	90	100	90	90,00	100	93,33	93,33
5	0	0	2.0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Konsistensi Prog/ Keg/ Sub Keg pada Renja Terhadap Renstra	100	100	100	100,00	100,00	95	98,33	98,33
5	0	0	2.0	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang dihasilkan	14	4	2	2	100,00	2	2,67	19,05

5	0 1	0 1	2.0 1	0 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24	8	4	4	100,00	4	5,33	22,22
5	0 1	0 1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100,00	100,00
5	0 1	0 1	2.0 2	0 1	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	146	21	22	22	100,00	22	21,67	14,84
5	0 1	0 1	2.0 2	0 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6	3	1	1	100,00	1	1,67	27,78
5	0 1	0 1	2.0 2	0 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	6	2	2	100,00	2	3,33	27,78
5	0 1	0 1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	33,33	100	0,00	0,00	100	44,44	44,44
5	0 1	0 1	2.0 5	0 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12	1	1	0	0,00	1	0,67	5,56
5	0 1	0 1	2.0 5	1 1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	21	1	1	0	0,00	1	0,67	3,17
5	0 1	0 1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	52	100	84,52	84,52	100	78,84	78,84

5	0 1	0 1	2.0 6	0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24	7	4	4	100,00	4	5,00	20,83
5	0 1	0 1	2.0 6	0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	26	4	4	2	50,00	5	3,67	14,10
5	0 1	0 1	2.0 6	0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24	5	4	4	100,00	4	4,33	18,06
5	0 1	0 1	2.0 6	0 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	72	12	4	4	100,00	12	9,33	12,96
5	0 1	0 1	2.0 6	0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	360	18	60	15	25,00	60	31,00	8,61
5	0 1	0 1	2.0 6	0 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	24	3	4	4	100,00	4	3,67	15,28
5	0 1	0 1	2.0 6	0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	104	13	18	21	116,67	17	17,00	16,35
5	0 1	0 1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	85,56	100	39,77	39,77	100%	42,11	42,11
5	0 1	0 1	2.0 8	0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	66	20	11	1	9,09	66	29,00	43,94

5	0 1	0 1	2.0 8	0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72	18	12	12	100,00	12	14,00	19,44
5	0 1	0 1	2.0 8	0 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	26	8	4	1	25,00	4	4,33	16,67
5	0 1	0 1	2.0 8	0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	66	20	12	3	25,00	11	11,33	17,17
5	0 1	0 1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan BMD Urusan Pemerintahan daerah	100	100	100	100,00	100,00	100	100,00	100,00
5	0 1	0 1	2.0 9	0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6	3	1	1	100,00	1	1,67	27,78
5	0 5	0 2			PROG. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	PRESENTASE KETERLAKSANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	100	66,67	50	50	100,00	0	38,89	38,89
5	0 5	0 2	2.0 1		Penelitian dan Pengembangan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Rekomendasi Hasil Penelitian dan Pengembangan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang di Tindak Lanjuti	100	33,33	100	0,00	0,00	0	11,11	11,11

5	0 5	0 2	2.0 1	0 3	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	1	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00
5	0 5	0 2	2.0 1	1 2	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1	1	0	0	0,00	0	1,00	100,00
5	0 5	0 2	2.0 1		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Rekomendasi Hasil Penelitian dan Pengembangan di Bidang Sosial dan Kependudukan yang di Tindak Lanjuti	100	53,33	100	0,00	0,00	0	17,78	17,78
5	0 5	0 2	2.0 1	0 5	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1	1	0	0	0,00	0	1,00	100,00
					Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1	0	0	0	0,00	1	1,00	100,00
5	0 5	0 2	2.0 3		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Rekomendasi Hasil Penelitian dan Pengembangan di Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang di Tindak Lanjuti	100	0	100	66,67	66,67	100	55,56	55,56
5	0 5	0 2	2.0 3	0 2	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	2	0	1	1	100,00	1	2,00	100,00

5	0 5	0 2	2.0 3	0 5	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	1	1	0	0	0,00	0	1,00	100,00
5	0 5	0 2	2.0 3	0 7	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1	0	1	1	100,00	0	1,00	100,00
5	0 5	0 2	1.0 4		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Produk Inovasi Daerah Bidang Pengembangan Inovasi dan Teknologi yang di Hasilkan dan Terindeks dalam sistim Inovasi	100	0	100	0	0,00	0	0,00	0,00
5	0 5	0 2	2.0 4	0 1	Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	5	0	1	0,00	0,00	0	0,00	0,00
5	0 5	0 2	2.0 4	0 2	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	4	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00
5	0 5	0 2	2.0 4	0 3	Deseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	6	1	1	0	0,00	0	0,33	5,56

2	2 0	0 2			PROG. PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	PENINGKATAN JUMLAH PERANGKAT DAERAH YANG MENGGUNAKAN DATA STATISTIK DALAM MENYUSUN PERENCANAAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH (KOMULATIF)	48	26	29	26,00	89,66	29	27,00	56,25
2	2 0	0 2	2.0 1		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Presentase Data Statistik Sektoral di Lingkup Pemerintah Daerah yang di Manfaatkan dalam Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	100	100	100	50,00	50,00	100	83,33	83,33
2	2 0	0 2	2.0 1	0 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	48	8	8	8	100,00	8	24,00	50,00
2	2 0	0 2	2.0 1	0 2	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	96	0	32	0	0,00	0	0,00	0,00

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Badan Penelitian, Pengembangan Daerah dan Statistik Kabupaten Halmahera Utara didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Badan Penelitian, Pengembangan Daerah dan Statistik

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11		14	15	16
1	Tingkat Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah			90%	90%	90%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Indeks Inovasi Daerah			44,28	50,12	58,95	71,92	20,44	16,48	30,50	36,25	42,50	
3	Rasio Jumlah produk inovasi daerah yang di manfaatkan secara berkelanjutan (persen)			95,20	100,00	100,00	100,00	0,00	60,00	50,00	90,00	90,00	
4	Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik dalam Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah			60,40%	68,80%	79,20%	89,60%	81,25%	81,25%	90%	100%	100%	

2.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAERAH & STATISTIK

Isu-isu penting merupakan kajian atas permasalahan strategis yang dihadapi Perangkat Daerah dalam upaya untuk menentukan kebijakan perumusan program dan kegiatan. Penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penelitian, Pengembangan Daerah & Statistik Kabupaten Halmahera Utara tidak lepas dari isu- isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Balitbang dan Statistik, maupun isu-isu yang bersifat eksternal. Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Badan Penelitian, Pengembangan Daerah & Statistik sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut

2.3.1. Sejauh mana tingkat pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan terkait dengan Pelayanan Perangkat Daerah

Secara umum kinerja Badan Penelitian, Pengembangan Daerah & Statistik Kabupaten Halmahera Utara terhadap target yang tercantum dalam dokumen perencanaan, terhadap Renja Tahun 2024 maupun Renstra Tahun 2021-2026 kategori cukup. Sebagian target yang telah ditetapkan dapat tercapai, bahkan terlampaui meskipun ada beberapa target indikator yang belum tercapai.

Badan Penelitian, Pengembangan Daerah & Statistik Kabupaten Halmahera Utara merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan 2 (dua) bidang urusan yaitu urusan penelitian dan pengembangan serta urusan pengembangan statistik sektoral. Sebagai organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penelitian dan pengembangan serta bidang statistik, Badan Penelitian, Pengembangan Daerah dan Statistik Kabupaten Halmahera Utara terus pengupayakan peningkatan hasil penelitian dan pengembangan, peningkatan indeks inovasi daerah dan data statistik sektoral yang di manfaatkan dalam evaluasi dan perencanaan daerah.

2.3.2. Permasalahan yang di hadapi

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi perencanaan, penelitian dan pengembangan diantaranya:

1. Hasil – hasil kelitbangan (rekomendasi penelitian dan pengembangan) yang di rekomendasikan dari Badan Penelitian, Pengembangan daerah & Statistik belum sepenuhnya di tindak lanjuti perangkat daerah
2. Dukungan inovasi daerah dari setiap perangkat daerah belum maksimal
3. Support data statistic sectoral dari masing – masing perangkat daerah juga belum maksimal
4. Dukungan anggaran yang tidak maksimal

2.3.3. Dampak dari permasalahan yang dihadapi terhadap pencapaian Visi dan Misi

Adanya permasalahan-permasalahan tersebut di atas dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah, meskipun secara tidak langsung. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

2.3.4. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan :

- a. Penyediaan Data dan Informasi Statistik sectoral untuk Kebutuhan Perencanaan dan Evaluasi.
Diperlukan kesamaan pemahaman OPD terkait pentingnya kebutuhan data sectoral OPD yang menggambarkan kondisi existing pada OPD untuk menunjang perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.
- b. Peningkatan Indeks Inovasi Daerah
Diperlukan koordinasi dan pendampingan yang baik terhadap ASN maupun OPD dalam meningkatkan Indeks Inovasi Daerah

- c. Meningkatkan koordinasi antara Perangkat Daerah dalam lingkup pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dalam hal penetapan program kegiatan berdasarkan rekomendasi hasil kajian Balitbangda & Statistik.
- d. Kapasitas Sumberdaya Aparatur Balitbangda & Statistik masih perlu untuk di tingkatkan.
- e. Penggunaan IPTEK dalam proses Satu Data yang berbasis Web sangat perlu untuk di tingkatkan.
- f. Meningkatkan Kerjasama dengan perangkat daerah maupaun akademisi serta masyarakat dalam pengembangan inovasi Daerah.
- g. Dilakukannya festival/ Lomba Inovasi secara terus menerus dalam rangka menjaring inovasi daerah

Peluang :

- a. Tersedianya potensi sumber daya aparatur yang harus dikelola dengan tepat, terutama dengan cara ditingkatkan kapasitasnya melalui pendidikan atau diklat Peningkatan indeks Inovasi Daerah, Pengelola Data Statistik sektoral daerah serta peneliti fungsional sehingga menghasilkan sumberdaya yang berkualitas dan berperan optimal dalam mendukung pencapaian kinerja Badan Penelitian, Pengembangan Daerah & Statistik.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan rancangan awal RKPD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2025 serta memperhatikan tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan, program kegiatan, indikator, target kinerja serta pagu indikatif jangka menengah, maka analisa kebutuhan Rencana Kerja Badan Penelitian, Pengembangan Daerah & Statistik Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3.
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Badan Penelitian, Pengembangan Daerah & Statistik Tahun 2025

No	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2025							
	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan		Loka si	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Targe t Capai an Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Targe t Capai an Kinerja	Kebutuhan Anggaran	Catat an Penti ng	
	Prog. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota		BPP DS	Tingkat Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Persen)	100%	2.886.005.469		Prog. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Tingkat Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Persen)	100%	2.886.005.469		
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		BPP DS	Tingkat Konsistensi Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dok	53.363.800		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Konsistensi Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dok	53.363.800	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daeraah		BPP DS	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang dihasilkan	2 Dok	41.807.200		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daeraah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang dihasilkan	2 Dok	41.807.200	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dok	11.556.600		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dok	11.556.600		

		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Realisasi Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah	29 Dok	2.535.594.769		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah	29 Dok	2.535.594.769	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 ASN	2.511.938.769		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 ASN	2.511.938.769	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap	15.486.900		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap	15.486.900	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	2 Lap	8.169.100		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	2 Lap	8.169.100	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	190.960.900		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	190.960.900	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	5.808.200		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	5.808.200	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	14.656.700		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	14.656.700	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4	5.413.600		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4	5.413.600	

		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60 Dok	12.624.400		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60 Dok	12.624.400	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Lap	5.272.000		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Lap	5.272.000	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16 OK	147.186.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16 OK	147.186.000	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPP DS	Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	28.086.000		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	28.086.000	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BPP DS	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 lap	23.946.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 lap	23.946.000	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Lap	4.140.000		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Lap	4.140.000	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan Pemeliharaan BMD Urusan Pemerintahan daerah	100%	78.000.000		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan BMD Urusan Pemerintahan daerah	100%	78.000.000	

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	78.000.000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	78.000.000	
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah		BPP DS	Persentase Hasil Penelitian dan pengembangan yang di tindak lanjuti Perangkat Daerah	100%	274.083.400	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah		Persentase Hasil Penelitian dan pengembangan yang di tindak lanjuti Perangkat Daerah	100%	274.083.400	
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi			Jumlah Rekomendasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi yang di tindak lanjuti	75%	200.000.000		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi	Jumlah Rekomendasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi yang di tindak lanjuti	75%	200.000.000	
		Penelitian dan Pengembangan Perhubungan		Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	1 Dok	200.000.000		Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	1 Dok	200.000.000	
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi			Jumlah Rekomendasi Hasil Penelitian dan Pengembangan di Bidang Inovasi dan Teknologi	75%	74.083.400	Pengembangan Inovasi dan Teknologi		Jumlah Rekomendasi Hasil Penelitian dan Pengembangan di Bidang Inovasi dan Teknologi	75%	74.083.400	
		Deseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat Inoatif		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Lap	74.083.400		Deseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat Inoatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Lap	74.083.400	

		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	BPP DS	Peningkatan Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Ststistik Dalam Menyusun Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Kumulatif)	100%	92.892.500		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Peningkatan Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Ststistik Dalam Menyusun Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Kumulatif)	100%	92.892.500	
		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kab/Kota	BPP DS	Presentase Data Statistik Sektoral di Lingkup Pemerintah Daerah yang di Manfaatkan dalam Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	100%	92.892.500		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kab/Kota	Presentase Data Statistik Sektoral di Lingkup Pemerintah Daerah yang di Manfaatkan dalam Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	100%	92.892.500	
		Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	BPP DS	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	1 Dok	92.892.500		Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	1 Dok	92.892.500	
TOTAL ANGGARAN						3.252.981.369					3.252.981.369	

2.5. Penelaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat / Pemangku Kepentingan

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, program/kegiatan usulan pemangku kepentingan merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan masyarakat/pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan bottom-up secara demokratis baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi, perguruan tinggi maupun perangkat daerah yang diperoleh dari pengumpulan informasi, penelitian dan pengamatan pelaksanaan musrenbang.

Selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dan mengakomodir usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dalam Rencana Kerja perangkat daerah. Penelaahan usulan pemangku kepentingan yang ditujukan kepada perangkat daerah juga bisa diperoleh dari Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang dilaksanakan pada saat Musrenbang Kabupaten. Untuk Badan Penelitian, Pengembangan Daerah & Statistik Kabupaten Halmahera Utara tidak ada usulan

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
			=NIHIL=		

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAERAH DAN STATISTIK

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Visi Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri 2020 – 2024 adalah :

“Menjadi Mitra terpercaya dalam Perumusan Kebijakan yang Responsif, Antisipatif dan Inovatif”.

Menjadi Mitra Terpercaya artinya Badan Litbang Kemendagri diharapkan dapat menghasilkan sumbangan pemikiran ilmiah melalui kegiatan penelitian dan pengembangan dalam bentuk pokok pikir dan rekomendasi kebijakan yang berkualitas untuk penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.

Responsif dan Antisipatif artinya adalah Badan Litbang Kemendagri selalu siap dalam segala perubahan yang dihadapi dalam mengatasi permasalahan yang muncul dan menjadi handal dalam merencanakan kegiatan penelitian dan pengembangan ke depan.

Inovatif adalah menjadi tonggak penggerak pelaksanaan dan pembinaan inovasi di pemerintahan dalam negeri.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Badan Litbang Kemendagri mempunyai misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan mutu rumusan kebijakan pemerintahan dalam negeri berbasis penelitian dan pengembangan (research based policy).
2. Mendorong inovasi daerah dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Mewujudkan kelembagaan litbang yang memiliki integritas dan kompetensi tinggi guna perwujudan reformasi birokrasi.

Sejalan dengan hal tersebut, untuk mewujudkan visi dan misinya, Badan Litbang Kemendagri menyelaraskan tujuan Kemendagri dengan menetapkan tujuan strategis Badan Litbang Kemendagri Tahun 2020-2024, yaitu:

1. Peningkatan kualitas hasil penelitian dan pengembangan dalam perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri (T1).

2. Pendayagunaan rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan oleh stakeholder (T2)
3. Pembinaan pelaksanaan inovasi daerah (T3).
4. Penguatan tata kelola penyelenggaraan penelitian dan pengembangan (T4).

Untuk mewujudkan visi dan misi diatas maka Badan Litbang Kemendagri menetapkan beberapa sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai sepanjang Tahun 2020-2024.

1. Untuk mewujudkan T1, ditetapkan sasaran strategis, yaitu: Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan, dengan indikator sasaran strategis, yaitu:
 - a) Peningkatan jumlah hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan pemerintahan dalam negeri.
 - b) Peningkatan jumlah hasil penelitian dan pengembangan yang masuk dalam jurnal ilmiah.
 - c) Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - d) Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah.
 - e) Kerjasama penelitian dan pengembangan.
2. Untuk mewujudkan T2, ditetapkan sasaran strategis, yaitu:
 - a) Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam perumusan kebijakan pemerintahan dalam negeri, dengan indikator sasaran strategis, yaitu: pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam perumusan kebijakan.
 - b) Meningkatnya keterlibatan Badan Litbang Kemendagri dalam perumusan kebijakan pemerintahan dalam negeri, dengan indikator sasaran strategis, yaitu: Keterlibatan Badan Litbang Kemendagri dalam penyusunan kebijakan.
3. Untuk mewujudkan T3, ditetapkan sasaran strategis, yaitu:
 - a) Tersedianya kebijakan penyelenggaraan inovasi daerah, dengan indikator sasaran strategis, yaitu Jumlah kebijakan inovasi daerah yang dihasilkan.
 - b) Peningkatan jumlah daerah yang berinovasi, dengan indikator sasaran strategis, yaitu Daerah yang menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan inovasi daerah berdasarkan indeks inovasi daerah.

- c) Meningkatnya kualitas inovasi daerah, dengan indikator sasaran strategis, Persentase daerah dengan kategori “inovatif” dan “sangat inovatif” berdasarkan peta pembinaan inovasi daerah.

4. Untuk mewujudkan T4, ditetapkan sasaran strategis, yaitu:

- a) Penguatan tata kelola penyelenggaraan kelitbang, dengan indikator sasaran strategis:
 - 1. Terselenggaranya rencana program dan anggaran Badan Litbang Kemendagri berpedoman pada Rencana Kerja Kemendagri.
 - 2. Tersedianya Organisasi yang optimal dan SDM yang kompeten.
- b) Pembinaan dan penguatan kelembagaan litbang daerah, dengan indikator sasaran strategis, yaitu:
 - 1. Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan daerah yang berkategori “utama”.
 - 2. Terfasilitasinya rencana induk kelitbang daerah.
 - 3. Terfasilitasinya penyediaan sumber daya manusia fungsional kelitbang daerah.

Dengan mempertimbangkan capaian kinerja, memperhatikan aspirasi masyarakat, potensi dan permasalahan, serta mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden maka visi Badan Pusat Statistik untuk Tahun 2020-2024 adalah “Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju” (“Provider of Qualified Statistical Data for Advanced Indonesia”).

Untuk mewujudkan visi diatas maka BPS mempunyai 4 misi antara lain :

- 1. Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional
- 2. Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan
- 3. Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional dan
- 4. membangun SDM yang unggul dan adaptif.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja (Renja) Badan Penelitian, Pengembangan Daerah dan Statistik Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2023 didasarkan pada rumusan tujuan dan sasaran serta isu-isu penting penyelenggaraan tugas fungsi

yang berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Penelitian, Pengembangan Daerah dan Statistik Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026, sebagai berikut :

Tujuan : Terwujudnya tata kelola pemerintahan melalui inovasi daerah

Indicator tujuan : Peningkatan Indeks Inovasi Daerah

Sasaran : Meningkatnya keterterapan hasil litbang serta daya guna statistic sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah serta berkesinambungan pemanfaatan produk inovasi daerah

Indikator Sasaran :

1. Peningkatan jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan Daerah (komulatif)
2. Rasio Jumlah produk inovasi daerah yang di manfaatkan secara berkelanjutan

3.3. Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah & Statistik Kab. Halmahera Utara yang telah dituangkan kedalam tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang berlaku dengan memperhatikan serta mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi Badan Penelitian, Pengembangan Daerah dan Statistik berdasarkan Perbub 44 Tahun 2016

Selanjutnya Program dan Kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Statistik kab. Halmahera Utara tahun Anggaran 2025 terdiri dari :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/ Kota

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

- 2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 3.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 3.2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 3.3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 3.4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 3.5. Fasilitas Kunjungan Tamu
 - 3.6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 4.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 4.2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 5.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- II. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
 1. Pengembangan Inovasi dan Teknologi
 - 1.1. Deseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif
- III. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor
 1. Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah kabupaten / Kota
 - 1.1. Penyelenggaraan Statistik Sektor yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

Rencana program dan kegiatan beserta indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, kebutuhan dana indikatif dan sumber dana akan disajikan dalam bentuk tabel (terlampir).

Tabel 4.1
Rencana Program dan Kegiatan pada Renja Balitbang dan Statistik
Tahun 2025

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Prog. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Tingkat Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Persen)	BPPDS	100%	2.886.005.469	DAU		100%	3.295.181.669
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Konsistensi Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPPDS	6 Dok	53.363.800			6 Dok	57.037.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang dihasilkan		2 Dok	41.807.200			2 Dok	44.077.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		4 Dok	11.556.600			4 Dok	12.960.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah	BPPDS	29 Dok	2.535.594.769	DAU		29 Dok	2.572.006.769
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		21 ASN	2.511.938.769			21 ASN	2.511.938.769

					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Lap	15.486.900			1 Lap	43.818.000
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		2 Lap	8.169.100			2 Lap	16.250.000
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-				70.000.000
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		0	-			1 OK	23.500.000
					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		0	-			2 OK	46.500.000
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	BPPDS	100%	190.960.900	DAU		100%	313.511.900
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		4	5.808.200			4	5.793.400

					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0	-			4	68.000.000
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		4	14.656.700			4	14.780.500
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	BPPDS	4	5.413.600	DAU		4	5.413.600
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		60 Dok	12.624.400			60 Dok	12.624.400
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		2 Lap	5.272.000			2 Lap	6.000.000
					Penyelenggara n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		16 OK	147.186.000			16 OK	200.900.000
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	28.086.000			100%	204.626.000
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0%	-			11 Lap	106.700.000
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		3 lap	23.946.000			3 lap	23.946.000
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		3 Lap	4.140.000			3 Lap	4.140.000
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0	-			12 Lap	69.840.000

					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan BMD Urusan Pemerintahan daerah		100%	78.000.000			100%	78.000.000
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	BPPDS	1 Unit	78.000.000	DAU		1 Unit	78.000.000
					Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Hasil Penelitian dan pengembangan yang di tindak lanjuti Perangkat Daerah		100%	274.083.400			100%	576.950.000
					Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Rekomendasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang di tindak lanjuti							213.475.000
					Fasilitasi pelaksanaan dan evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan, dan aset Daerah Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Fasilitasi pelaksanaan dan evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan, dan aset Daerah Reformasi Birokrasi		0,00	-			1 Dok	213.475.000

					Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Rekomendasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang di tindak lanjuti			-			100%	213.475.000
					Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata			-			1 Dok	213.475.000
					Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi	Jumlah Rekomendasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi yang di tindak lanjuti			200.000.000				-
					Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan		1 Dok	200.000.000				-
					Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Rekomendasi Hasil Penelitian dan Pengembangan di Bidang Inovasi dan Teknologi		75%	74.083.400			75%	150.000.000
					Deseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif		1 Lap	74.083.400			1 Lap	150.000.000
					Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Peningkatan Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Kumulatif)		100%	92.892.500			100%	200.000.000

						Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kab/Kota	Presentase Data Statistik Sektoral di Lingkup Pemerintah Daerah yang di Manfaatkan dalam Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah		100%	92.892.500	DAU		100%	200.000.000
						Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata		1 Dok	92.892.500			1 Dok	150.000.000
						Peningkatan Kualitas Data Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu			-			32 OPD	50.000.000
Total Anggaran										3.252.981.369				4.072.131.669

BAB V

PENUTUP

5.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Penyusunan dan penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian, Pengembangan Daerah & Statistik sebagaimana tertuang dalam Badan Penelitian, Pengembangan Daerah & Statistik Tahun 2025.

Yang menjadi catatan penting dalam penyusunan Renja Badan Penelitian, Pengembangan Daerah & Statistik adalah, dalam rangka memperoleh pencapaian hasil yang optimal maka keterpaduan dan sinkronisasi antar program dan kegiatan dalam satu instansi maupun antar instansi harus menjadi perhatian penting, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah. Oleh karena itu untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, melalui tahapan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

5.2. Kaidah – Kaidah Pelaksanan

Sehubungan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, maka beberapa hal yang ditetapkan sebagai kaidah dalam penyusunan Renja Badan Penelitian, Pengembangan Daerah & Statistik Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2025 sebagai berikut :

- a. Dalam upaya meningkatkan dokumen perencanaan yang sinergis dan sinkron, baik antara Satuan Kerja Perangkat Daerah maupun antar Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan/atau Pemerintah Pusat, maka Badan Penelitian, Pengembangan Daerah & Statistik harus mampu menjalankan fungsinya dalam arti mampu mengkoordinir dan menjembatani seluruh

kepentingan perencanaan sehingga tidak terjadi tumpang tindih sasaran pembangunan.

- b. Seluruh program dan kegiatan yang tertuang di dalam Rencana Kerja Badan Penelitian, Pengembangan Daerah & Statistik Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2025, disusun berdasarkan kemampuan keuangan daerah. Hal ini berarti Badan Penelitian, Pengembangan Daerah & Statistik harus mampu untuk memilah mana program dan kegiatan yang dianggap prioritas, yang mampu didanai berdasarkan pagu indikatif yang ditetapkan, untuk selanjutnya dimasukkan dalam Renja Badan Penelitian, Pengembangan Daerah & Statistik Tahun 2025.
- c. Kualitas suatu dokumen perencanaan akan mencerminkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Terkait dengan hal itu maka dalam penyusunan Renja Badan Penelitian, Pengembangan Daerah & Statistik ini, disadari bahwa masih perlunya analisis dan evaluasi dari berbagai pihak agar diharapkan dengan adanya perbaikan kualitas dokumen perencanaan akan berdampak positif pada pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Adapun beberapa rencana tindak lanjut terkait dengan tersusunnya Rencana Kerja Badan Penelitian, Pengembangan Daerah & Statistik Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2025, adalah sebagai berikut :

- a. Renja Badan Penelitian, Pengembangan Daerah & Statistik Tahun 2024 harus menjadi acuan kerja dari semua bagian dan bidang lingkup Badan Penelitian, Pengembangan Daerah & Statistik, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dan dilaksanakan secara akuntabel dengan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga dan peningkatan kinerja pegawai Badan Penelitian, Pengembangan Daerah & Statistik
- b. Pentingnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks.

- c. Dalam rangka mewujudkan sinergitas perencanaan, maka langkah koordinasi rencana pembangunan lintas OPD lebih insentif dilakukan agar pembangunan yang dilaksanakan dapat berdaya guna dan berhasil guna.
- d. Review dan evaluasi serta saran konstruktif terhadap Renja Badan Penelitian, Pengembangan Daerah & Statistik Tahun 2025 sangat diperlukan dalam rangka kualitas dokumen perencanaan.

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Badan Penelitian, Pengembangan Dearah & Statistik Tahun Anggaran 2025 secara umum yang perencanaannya mengarah kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupateb Halmahera Utara. Semoga perencanaan yang telah di susun dapat terealisasi sepenuhnya dalam rangka mencapai Visai dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara yang telah di tetapkan dan juga selaras dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara khususnya pembangunan di bidang penelitian, pengembangan dan statistic.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja (RENJA) Badan Penelitian, Pengembangan Daerah dan Statistik Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2025 ini, dokumen perencanaan ini di akan jadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.